

**ANALISIS DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PEMERINTAH TERHADAP
KUALITAS PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

***IMPACT OF GOVERNMENT BUDGET EFFICIENCY ON
PUBLIC UNIVERSITY EDUCATION QUALITY IN BANGKA BELITUNG***

Inda Sari^{1*)}, Siti Nurhasanah²⁾, Septian Ari Utomo³⁾, Ayu Syahrani⁴⁾,
Tiara Revalia⁵⁾, Agung Risky Putra⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6)} Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung

*e-mail korespondensi: indadqueen.68@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Kualitas pendidikan, perguruan tinggi negeri di Bangka Belitung, dan kebijakan efisiensi anggaran dalam konteks Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Republik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis kebijakan publik, penelitian ini menguraikan bagaimana implementasi efisiensi anggaran berkontribusi terhadap kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini memberikan dampak positif bagi pemerintah Indonesia untuk menghemat dana penggunaan yang tidak efisien. Namun dalam konteks pendidikan yang masuk kategori tersier, terdapat pula pengaruh yang signifikan terhadap kualitas suatu pendidikan yang akan berdampak pada proses perkuliahan mahasiswa.

Kata Kunci: Bangka Belitung; Efisiensi Anggaran; Kualitas Pendidikan

Abstract

This research aims to analyze the relationship between education quality, public universities in Bangka Belitung, and budget efficiency policies in the context of the Ministry of Higher Education, Science, and Technology (Kemendiktisaintek) of the Republic of Indonesia. Using a descriptive qualitative approach and public policy analysis, this study outlines how the implementation of budget efficiency contributes to the quality of education in public universities. The findings show that the implementation of this policy has a positive impact on the Indonesian government to save funds for inefficient use. However, in the context of tertiary education, there is also a significant influence on the quality of education, will have an impact on the student lecture process.

Keywords: Bangka Belitung; Budget Efficiency; Education Quality

PENDAHULUAN

Diawal tahun 2025, Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam memperbaiki pengelolaan keuangan Negara. Kebijakan ini merupakan hasil dari berbagai kritik terkait penggunaan anggaran yang dianggap kurang efisien dan tidak tepat sasaran. Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto berdampak langsung pada pola kerja dan sarana pendukung di berbagai sektor. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Dengan diberlakukan kebijakan ini secara signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut (Suadi (1999), efisiensi adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan tujuan yang ingin dicapai dan kemampuan untuk mengerjakan dengan benar. Adapun terkait pelayanan publik, maka efisiensi anggaran didefinisikan juga oleh Musgrave (1964) menyatakan bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik berarti mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan manfaat sosial. Menurut Mardiasmo (2002) efisiensi diartikan sebagai penggunaan dana public secara hemat, tanpa mengorbankan efektivitas pencapaian tujuan pemerintah. Dapat disimpulkan efisiensi anggaran merupakan kebijakan dalam mengelola anggaran dengan mengalokasikannya secara optimal dan penggunaan anggaran secara hemat, namun tetap memberikan manfaat kepada masyarakat.

Efisiensi anggaran merupakan salah satu program atau kebijakan dalam pengelolaan keuangan publik yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, tantangan dalam pengelolaan anggaran semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah memiliki dampak besar pada berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Walaupun efisiensi anggaran menawarkan banyak manfaat, terdapat risiko pengurangan anggaran yang dapat berakibat buruk pada sektor pendidikan. Jika tidak dilakukan secara cermat, pemotongan anggaran dapat mengurangi sumber daya untuk program-program penting yang telah direncanakan, sehingga dana yang tersedia akan dipangkas, termasuk untuk pengadaan buku teks, alat peraga, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan siswa. Salah satu elemen penting lainnya dalam sektor pendidikan adalah program beasiswa. Efisiensi anggaran ini mempengaruhi jumlah kuota mahasiswa yang mendapatkan bantuan, yang akan berkurang dari kuota sebelumnya.

Efisiensi anggaran merupakan konsep penting dalam pengelolaan keuangan publik yang bertujuan tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana negara. Dalam konteks Indonesia, kebijakan efisiensi anggaran yang diinisiasi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menargetkan penghematan sebesar Rp 306,69 triliun, dengan pemangkasan pada kementerian/lembaga dan transfer ke daerah sebagai langkah strategis untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih baik bagi program pembangunan prioritas.

Secara teoritis, efisiensi anggaran harus mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan nyata, antara lain

resistensi birokrasi, potensi pengurangan kualitas layanan publik, dan risiko pemangkasan pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun kebijakan efisiensi anggaran bertujuan positif, terdapat celah (gap) ilmiah yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dampaknya terhadap kualitas pendidikan tinggi di daerah berkembang seperti Bangka Belitung. Beberapa gap yang teridentifikasi antara lain:

1. Dampak Pemangkasan Anggaran pada Sektor Produktif

Meskipun efisiensi anggaran bertujuan mengurangi pemborosan, terdapat celah dalam pemahaman bagaimana pemotongan anggaran pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan secara spesifik mempengaruhi output dan outcome pembangunan jangka panjang. Studi empiris yang mendalam masih terbatas untuk mengukur dampak makro ekonomi dan sosial dari pemangkasan tersebut, terutama terkait dengan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Efektivitas Pengalokasian Anggaran Setelah Pemangkasan

Kebijakan efisiensi menuntut pengalihan fokus belanja dari pos yang tidak prioritas ke sektor strategis. Namun, terdapat kekurangan penelitian yang mengkaji efektivitas realokasi anggaran ini di lapangan, apakah benar-benar terjadi peningkatan produktivitas dan manfaat sosial yang signifikan setelah pemangkasan dilakukan.

3. Pengaruh Terhadap Program Sosial dan Pendidikan

Pemangkasan anggaran berpotensi mengurangi kuota program beasiswa dan dukungan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Gap penelitian muncul dalam hal bagaimana pengurangan tersebut berdampak pada akses pendidikan dan mobilitas sosial, serta bagaimana kebijakan efisiensi dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan kualitas dan kuantitas program sosial yang krusial.

4. Resistensi dan Dinamika Birokrasi dalam Pelaksanaan Efisiensi

Pelaksanaan efisiensi anggaran tidak hanya soal teknis pemangkasan, tetapi juga melibatkan dinamika politik dan birokrasi yang kompleks. Belum banyak kajian yang mengupas hambatan birokrasi dan strategi mitigasi resistensi dalam rangka memastikan kebijakan efisiensi berjalan efektif tanpa mengganggu kontinuitas program pemerintah.

5. Keseimbangan antara Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik

Efisiensi anggaran harus dijalankan dengan tetap menjaga mutu pelayanan publik. Namun, literatur yang ada masih minim dalam memberikan panduan empiris bagaimana pemerintah daerah dan pusat dapat mengelola efisiensi tanpa mengorbankan kualitas program, terutama dalam konteks pelayanan publik yang berkelanjutan.

Melalui penelitian ini, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi gap (celah) tersebut dengan melakukan kajian mendalam mengenai hubungan antara efisiensi anggaran dan kualitas pendidikan tinggi di Bangka Belitung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi adaptasi yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi setempat. Diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Efisiensi Anggaran Pemerintah dalam Perspektif Empiris

Efisiensi anggaran merujuk pada kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara optimal guna mencapai tujuan pembangunan dengan biaya minimal (Musgrave, 1959; Mardiasmo, 2002). Penelitian Fahrianta & Carolina (2016) serta Murdani & Suherlan (2014) menemukan bahwa implementasi efisiensi anggaran di sektor pendidikan daerah menghasilkan output yang variatif: di satu sisi mampu menghemat dana, tetapi di sisi lain berisiko menurunkan kualitas layanan pendidikan jika tidak disertai manajemen strategis. Rahman (2017) menekankan bahwa efisiensi anggaran harus diiringi dengan efektivitas pembiayaan pendidikan agar tidak mengorbankan kualitas, terutama di sektor pendidikan tinggi yang memerlukan pembiayaan riset dan pengembangan SDM secara berkelanjutan. Khan dan Hildreth (2002) menggarisbawahi pentingnya evaluasi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran agar efisiensi menghasilkan nilai tambah nyata. Namun, masih sedikit studi yang secara kontekstual meneliti dampak implementasi efisiensi anggaran di provinsi berkembang seperti Bangka Belitung, khususnya di sektor pendidikan tinggi. Kekosongan inilah yang ingin dijawab dalam penelitian ini.

Kualitas Pendidikan Tinggi dan Indikatornya

Kualitas pendidikan tinggi diukur melalui indikator seperti akreditasi, kualitas dosen, fasilitas, dan hasil belajar mahasiswa (Tilaar & Sewu, 2023). Studi Darmawan et al. (2025) menegaskan bahwa pengurangan anggaran berpotensi mengganggu penyediaan layanan dasar pendidikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Utami et al. (2021) menyoroti pentingnya efisiensi anggaran yang tetap mempertahankan mutu pendidikan, dengan menyarankan pengurangan pada komponen non-esensial dan menjaga belanja langsung yang berkontribusi terhadap kualitas akademik. Namun, belum ada studi spesifik yang membedah bagaimana efisiensi anggaran memengaruhi kualitas perguruan tinggi negeri di Bangka Belitung secara institusional dan operasional.

Relasi antara Efisiensi Anggaran dan Kualitas Pendidikan Tinggi

Johnstone dan Marcucci (2007) menyatakan bahwa efisiensi anggaran berperan strategis dalam menentukan kualitas pendidikan, karena dapat memperkuat aksesibilitas, keberlanjutan finansial, dan mutu layanan. Akan tetapi, efisiensi yang tidak selektif dapat berdampak kontraproduktif terhadap pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi. Di tingkat internasional, negara seperti Tiongkok berhasil menerapkan efisiensi fiskal tanpa mengorbankan sektor pendidikan tinggi (Wahyudin, 2021). Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang mengalami ketergantungan tinggi pada dana APBN seperti Bangka Belitung.

Kesenjangan Penelitian dan Relevansi Studi

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efisiensi anggaran pendidikan di tingkat nasional atau kabupaten/kota (Putri, 2019; Mardiyah, 2014), dengan minimnya eksplorasi terhadap konteks perguruan tinggi di provinsi perbatasan atau daerah kepulauan. Penelitian ini menawarkan kontribusi empiris dengan menganalisis secara langsung bagaimana dua institusi pendidikan tinggi negeri di Bangka Belitung Universitas Bangka Belitung dan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik

menghadapi implementasi efisiensi anggaran, termasuk strategi adaptif mereka dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal eksplanatori yang bersifat eksploratif, bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak kebijakan efisiensi anggaran pada dua institusi pendidikan tinggi, yaitu Universitas Bangka Belitung dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitik. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam dan holistik perspektif subjektif dari bagian perencanaan perguruan tinggi terkait implementasi kebijakan efisiensi anggaran.

Informan

Data primer dikumpulkan melalui wawancara informal dengan dua narasumber kunci yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran di masing-masing institusi.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitik, di mana data hasil wawancara dianalisis secara kontekstual untuk menjelaskan proses implementasi efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap operasional institusi pendidikan tinggi. Analisis dilakukan dengan menelaah narasi informan secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL ANALISIS

Hasil Berdasarkan Temuan Lapangan

Efisiensi Anggaran dan Respons Institusi Pendidikan Tinggi

Kebijakan efisiensi anggaran mendorong institusi seperti Universitas Bangka Belitung (UBB) dan IAIN SAS untuk lebih kreatif dalam mengelola dana terbatas. Contohnya, UBB memusatkan pengadaan ATK dan memanfaatkan platform daring untuk efisiensi biaya. IAIN SAS melakukan efisiensi dengan mengalihkan program mahasiswa menjadi berbasis swadaya dan kolaboratif.

Dampak Positif Efisiensi Anggaran

Perguruan tinggi negeri di Bangka Belitung, seperti UBB dan IAIN, terdorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Mereka mengembangkan kolaborasi dengan pihak swasta, seperti penyelenggaraan seminar berbasis partisipasi mandiri mahasiswa dan penggunaan platform digital untuk ujian. Pengadaan alat tulis kantor ATK dipusatkan guna mengurangi duplikasi dan penghematan biaya. Praktik-praktik ini menumbuhkan budaya efisiensi, inovasi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.

Efisiensi anggaran juga mendorong universitas untuk mengembangkan sumber pendapatan non-APBN. Contohnya, UBB mengaktifkan kembali unit usaha air galon isi ulang di Fakultas Teknik, yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan alternatif, tetapi juga sarana pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa.

Dampak Negatif Efisiensi Anggaran

1. Pemotongan anggaran menyebabkan penundaan pembelian peralatan dan sarana pendidikan di IAIN, sehingga pembelajaran berbasis praktikum menjadi kurang optimal dan menurunkan kompetensi teknis mahasiswa.
2. Keterbatasan dana menyebabkan tertundanya akreditasi empat program studi di IAIN karena tidak mampu membayar biaya registrasi ke LAM. Penundaan ini berisiko menurunkan reputasi institusi dan membatasi kesempatan mahasiswa memperoleh pengakuan kompetensi.
3. Di UBB, pemotongan anggaran menyebabkan pembatalan program magang mahasiswa ke luar negeri dan pengalihan event nasional ke format virtual, yang menurunkan kualitas pengalaman belajar dan jejaring profesional mahasiswa.
4. Pengurangan anggaran juga berdampak pada terbatasnya pembangunan infrastruktur, pengadaan ATK, serta fasilitas pendukung akademik dan penelitian di UBB.
5. Efisiensi anggaran memperburuk daya beli masyarakat di Bangka Belitung, terutama setelah kemunduran sektor tambang timah, sehingga menurunkan angka partisipasi pendidikan tinggi dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
6. Pengurangan belanja pemerintah di sektor pendidikan mengurangi program pengabdian masyarakat, penelitian terapan, dan pembangunan infrastruktur yang berfungsi sebagai stimulus ekonomi lokal di sekitar kampus.

Isu khusus: Beasiswa dan UKT

Hingga saat ini, tidak ada pengurangan kuota Beasiswa Kip Kuliah di UBB, meskipun jumlahnya belum meningkat. Penghematan anggaran difokuskan pada sektor non-esensial, bukan pada program inti seperti beasiswa. Tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di UBB karena belum ada izin resmi dari kementerian. Status UBB sebagai PTN BLU membatasi kewenangan menaikkan UKT, dan pemerintah pusat juga membekukan kenaikan UKT secara nasional.

Diskusi

Efisiensi Anggaran dan Inovasi Institusi

Temuan di lapangan sejalan dengan teori manajemen anggaran publik yang menekankan pentingnya efektivitas dalam alokasi sumber daya (Mardiasmo, 2009). Temuan lapangan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat mendorong institusi pendidikan tinggi untuk berinovasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya. Hal ini sejalan dengan teori manajemen sumber daya yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran dapat menjadi pemicu inovasi dan efisiensi operasional (Osborne & Gaebler, 1992). Praktik kolaborasi dengan pihak swasta dan optimalisasi unit usaha internal merupakan bentuk adaptasi terhadap tekanan fiskal, sebagaimana didukung oleh literatur tentang kewirausahaan institusi pendidikan (Clark, 1998).

Dampak Negatif pada Kualitas Pendidikan

Efisiensi anggaran yang berlebihan dapat mengancam kualitas pendidikan, terutama pada aspek yang memerlukan investasi besar seperti sarana-prasarana dan pengembangan SDM (Salmi, 2014). Penundaan pengadaan peralatan praktikum dan akreditasi, serta pembatalan program magang internasional, berpotensi menurunkan mutu lulusan dan daya saing institusi di tingkat nasional maupun global. Penundaan fasilitas pembelajaran dan akreditasi membuktikan teori bahwa investasi

pada sarana-prasarana merupakan input penting dalam fungsi produksi pendidikan (Hanushek, 1986). Ini sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pendidikan dan keterbatasan dana. Pemangkasan remunerasi dan honor di IAIN SAS menimbulkan tantangan dalam mempertahankan motivasi kerja dosen, yang menurut (Herzberg, 1959), berkaitan erat dengan faktor hygiene dalam kepuasan kerja.

Akses dan Keadilan Pendidikan

Teori keadilan pendidikan (Rawls, 1971) menekankan pentingnya pemerataan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Kebijakan efisiensi yang membatasi subsidi pendidikan dan memperburuk daya beli masyarakat berisiko memperlebar kesenjangan akses pendidikan tinggi, terutama di daerah ekonomi rentan seperti Bangka Belitung. Namun, upaya pemerintah untuk tidak memangkas kuota beasiswa dan membekukan kenaikan UKT merupakan langkah strategis untuk menjaga aksesibilitas pendidikan, sesuai dengan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dalam literatur pendidikan tinggi (Marginson, 2016a). Konsistensi pemerintah dalam mempertahankan kuota Beasiswa KIP Kuliah mencerminkan upaya menjaga keadilan distributif dalam pendidikan, sesuai dengan prinsip Rawlsian mengenai pemerataan kesempatan.

Efek Multiplikasi Belanja Pendidikan

Belanja pemerintah di sektor pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai investasi SDM, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi lokal (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Pengurangan anggaran berdampak pada pelaku usaha di sekitar kampus, mengurangi efek multiplikasi ekonomi yang biasanya dihasilkan oleh aktivitas pendidikan tinggi. Honor untuk kegiatan non-esensial dikurangi, namun honor bimbingan skripsi dan gaji tetap dibayarkan penuh di UBB. Di IAIN SAS, dosen tidak tetap mengalami pemangkasan honor hingga 40%, dan dosen non-BKN tidak menerima gaji.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menghasilkan dampak ganda: di satu sisi mendorong inovasi dan efisiensi, di sisi lain berpotensi menurunkan kualitas dan akses pendidikan jika tidak dikelola secara proporsional. Perlunya keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan pembangunan pendidikan, terutama di daerah dengan tantangan ekonomi yang kompleks. UBB dan IAIN SAS mengusulkan efisiensi anggaran seharusnya difokuskan pada sektor non-esensial, serta menyoroti arah politik anggaran yang kurang berpihak pada pendidikan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan beberapa poin penting terkait dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap kualitas pendidikan di perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertama, efisiensi anggaran merupakan kebijakan strategis yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara secara efektif dengan biaya minimal, namun pelaksanaannya harus berhati-hati agar tidak mengorbankan sektor krusial seperti pendidikan tinggi. Kedua, penerapan efisiensi anggaran telah mendorong inisiatif positif di perguruan tinggi, seperti peningkatan pemanfaatan teknologi digital, pengembangan kolaborasi eksternal, dan optimalisasi penggunaan dana operasional secara tepat sasaran, yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dapat memicu efisiensi dan inovasi dalam layanan akademik. Ketiga, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti keterbatasan dukungan fasilitas penunjang akademik, penundaan proses akreditasi, serta pengurangan alokasi dana untuk program

pengembangan mahasiswa. Oleh karena itu, penerapan efisiensi anggaran perlu disesuaikan dengan konteks sektoral dan tidak dilakukan secara menyamaratakan, mengingat pendidikan tinggi merupakan sektor strategis yang memerlukan perlindungan anggaran untuk terus berkontribusi pada pembangunan bangsa.

REKOMENDASI

Penelitian ini merekomendasikan agar evaluasi implementasi kebijakan efisiensi anggaran dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan tidak menghambat fungsi strategis perguruan tinggi dalam pembangunan sumber daya manusia.

REFERENSI

- Clark, B. R. (1998). *Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of transformation*. Pergamon Press.
- Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 12-29.
- Fahrianta, R. Y., & Carolina, V. (2016). Analisis efisiensi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 13(1).
- Hanushek, E. A. (1986). The economics of schooling: Production and efficiency in public schools. *Journal of Economic Literature*, 24(3), 1141–1177.
- Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The motivation to work*. New York, NY: John Wiley & Sons.
- Johnstone, D. B., & Marcucci, P. N. (2007). Worldwide trends in higher education finance: Cost-sharing, student loans, and the support of academic research. *Issue Brief*. Institute for Higher Education Policy.
- Khan, A., & Hildreth, W. B. (2002). *Budget Theory in the Public Sector* (1st ed.). Quorum Books.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik (hlm. 132–134). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik (hlm. 61, 132). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiyah, N. (2014). Analisis efisiensi anggaran pendidikan di Kabupaten Boyolali [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. Universitas Muhammadiyah Surakarta Repository.
- Marginson, S. (2016a). Higher education and inequality in Anglo-American societies. In A. Harvey, C. Burnheim, & M. Brett (Eds.), *Student equity in Australian higher education: Twenty-five years of a fair chance for all* (pp. 165–182). Singapore: Springer.
- Murdani, M., & Suherlan, A. (2014). Analisis efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD Kabupaten Aceh Besar pada periode 2008–2012. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/sjie.v3i2.2057>

- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Musgrave, R. A. (1964). Efficiency vs. Equity in Public Finance. *Review of Social Economy*, 22(1), 1–8.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458.
- Putri, U. H. (2019). Efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan.
- Rahman, A. (2017, Oktober). Efisiensi dalam pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. *Eklektika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Pendidikan*, 5(2). Universitas Negeri Makassar.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Salmi, J. (2014). Creating world-class universities: Learning environment, infrastructure, and academic staff. *European Scientific Journal*, 12(10), 263–280.
- Suadi, A. (1999). *Sistem pengendalian manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Tilaar, T. S., & Sewu, P. L. S. (2023). Review of electronic medical records in Indonesia and its developments based on legal regulations in Indonesia and its harmonization with electronic health records (manual for developing countries). *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(3), 422-430.
- Utami, B. S. A., Basya, M. M., & Anindhita, A. Y. (2021). Efisiensi Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2018. *Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 17(2), 98-104.
- Wahyudin, U. R. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. Deepublish.